**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus-menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan.

Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus-menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya dokumen perencanaan pembangunan nasional dan penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

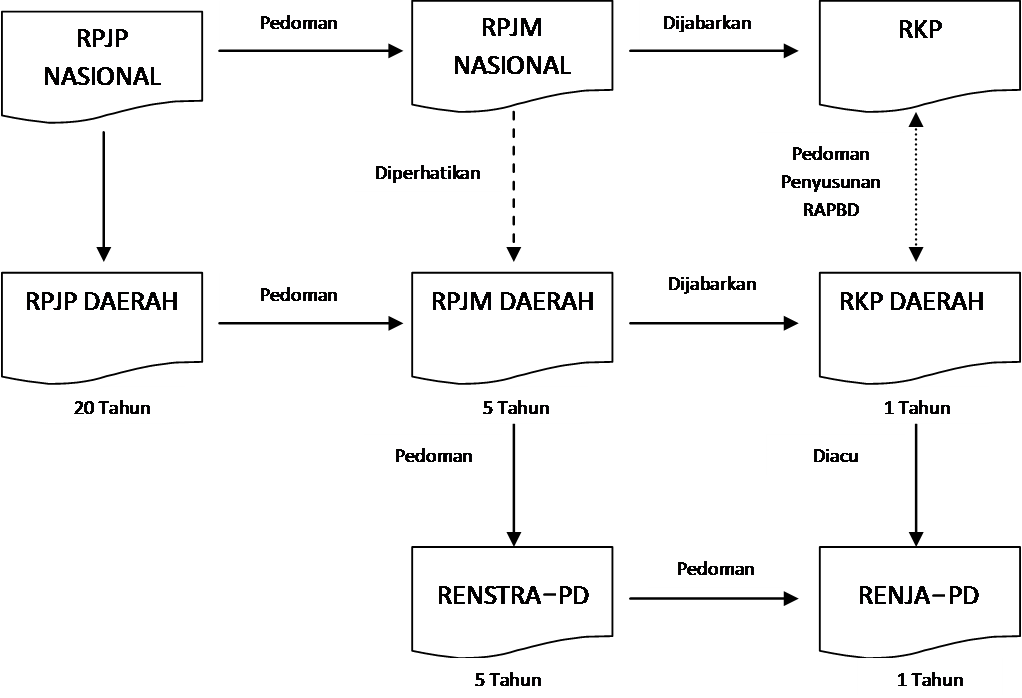
Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bobotsari, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka Kecamatan Bobotsari sebagai OPD menyusun Renstra OPD Tahun 2016-2021 yang mampu memberikan gambaran, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya. Dari dokumen Renstra tersebut, selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun.

Renja OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparatur Kecamatan Bobotsari dalam membina masyarakat, melayani, memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, mengevaluasi kinerja OPD pada tahun-tahun sebelumnya, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

Renja OPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan RKPD Kabupaten yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Bobotsari Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Adapun proses dan tahapan dalam penyusunan Renja OPD serta keterkaitannya dengan Renstra OPD, RKPD Kabupaten, Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.**

**Bagan Alur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

* 1. **Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapaten Purbalingga;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten;
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari Tahun 2016-2021 dan memberikan arah serta pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan OPD Kecamatan Bobotsari setiap tahunnya.

Renja OPD Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan OPD Kecamatan Bobotsari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi OPD Kecamatan Bobotsari dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
3. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar program dan kegiatan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bobotsari;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Bobotsari;
5. Memudahkan seluruh jajaran ASN Kecamatan Bobotsari dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran ASN Kecamatan Bobotsari untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
7. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan OPD Kecamatan Bobotsari dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

**1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 134 yaitu sebagai berikut :

**BAB I** **PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renja OPD dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renja OPD dan keterkaitannya dengan Renstra OPD, RKPD Kabupaten, Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten.

* 1. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renja OPD dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.

* 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

* 1. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur OPD

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan OPD, gambaran struktur OPD, dan uraian tugas pokok dan fungsi OPD.

2.2. Sumber Daya OPD

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada pada OPD baik sumber daya manusia, aset/modal, dan sumber daya lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renja OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renja K/L dan Renja OPD Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada 1 (satu) tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai jenis-jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

**BAB III** **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2016**

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Bobotsari Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kecamatan Bobotsari

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Bobotsari Tahun 2016 dan perkiraan capaian Tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD Kecamatan Bobotsari Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Bobotsari

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Bobotsari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Bobotsari

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas OPD Kecamatan Bobotsari Tahun 2017.

3.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Purbalingga

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.

3.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan OPD.

**BAB IV** **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

4.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas poko dan fungsi OPD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kecamatan Bobotsari

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bobotsari Tahun 2017 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

4.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB V PENUTUP**

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renja OPD.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Renja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 100), maka Kecamatan Bobotsari selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

**2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tugas Pokok Kecamatan Bobotsari selaku OPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

* 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, OPD Kecamatan Bobotsari juga mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
4. Pelaksanaaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**2.1.2. Struktur Organisasi**

OPD Kecamatan Bobotsari adalah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Desa

Desa

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Gambar 2.**

**Struktur Organisasi Kecamatan**

Pejabat Struktural ASN pada OPD Kecamatan Bobotsari yaitu sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dari masing-masing jabatan struktural mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
   1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
   2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
   7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
   8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
   9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
   10. Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di kecamatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
8. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

* + - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kedua Sub Bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas yaitu :
2. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Fasilitasi administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB;
5. Mengkoordinasikan keamanan wilayah;
6. Fasilitasi pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional;
7. Melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Melakukan inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
9. Melakukan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD;
10. Melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
11. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana, dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
12. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
13. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa;
14. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga / Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI);
15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan;
16. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerja sama antar desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.
17. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
18. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana;
19. Melakukan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan;
20. Melakukan fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.
    1. **Sumber Daya OPD**
       1. **Kepegawaian**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mulai tahun 2017, OPD Kecamatan Bobotsari didukung personil sebanyak 14 (empat belas) orang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN | JUMLAH |
| 1. | Camat | 1 orang |
| 2. | Sekretaris Kecamatan | 1 orang |
| 3. | Kepala Seksi | 3 orang |
| 4. | Kepala Sub Bagian | 2 orang |
| 5 | Staf / Pelaksana | 7 orang |
| Jumlah | | 1. orang |

**Tabel 1.**

**Perincian Berdasarkan Jumlah Personil**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN | PENDIDIKAN | | | | | | JUMLAH |
| S D | SLTP | SLTA | Diploma | S 1 | S 2 |
| 1. | Camat | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretaris Kecamatan | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3. | Kepala Seksi | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 5 | Staf / Pelaksana | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
| Jumlah | | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 14 |

**Tabel 2.**

**Perincian Berdasarkan Pendidikan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN | GOL. RUANG | | | | JUMLAH |
| I | II | III | IV |
| 1. | Camat | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Sekretaris Kecamatan | - | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Kepala Seksi | - | - | 3 | - | 3 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | - | - | 2 | - | 2 |
| 5 | Staf / Pelaksana | - | 5 | 2 | - | 7 |
| Jumlah | | - | 5 | 7 | 2 | 14 |

**Tabel 3.**

**Perincian Berdasarkan Golongan Ruang**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JABATAN | DIKLATPIM | | | | JUMLAH |
| II | III | IV | Belum |
| 1. | Camat | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Sekretaris Kecamatan | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Kepala Seksi | - | - | 3 | - | 3 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | - | - | 2 | - | 2 |
| 5. | Staf / Pelaksana | - | - | - | 7 | 7 |
| Jumlah | | - | 2 | 5 | 7 | 14 |

**Tabel 4.**

**Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

* + 1. **Sarana Dan Prasarana Kantor**

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, OPD Kecamatan Bobotsari memiliki aset berupa sarana dan prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Bobotsari dapat dirinci sebagaimana terlampir dalam Lampiran Renja OPD Kecamatan Bobotsari (Kartu Inventaris Barang A-F).

* + 1. **Geografis**

a. Kecamatan Bobotsari terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 214 m/dpl;

1. Temperatur rata-rata 27-30°C, dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar 2.933 mm/tahun;
2. Kecamatan Bobotsari terletak di sebelah utara Pusat Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
3. Luas wilayah Kecamatan Bobotsari 3.228,00 ha;
4. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten 11 km;
5. Adapun batas-batas Kecamatan Bobotsari sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Karangreja

- Timur : Kecamatan Karanganyar

- Selatan : Kecamatan Mrebet

- Barat : Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Karangreja

* + 1. **Peruntukan Lahan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Desa** | **Tanah Sawah** | **Tanah Kering** | **Jumlah** |
| 1. | Gandasuli | 45,83 | 36,08 | 81,92 |
| 2. | Kalapacung | 61,16 | 53,77 | 114,94 |
| 3. | Karangmalang | 178,83 | 62,09 | 240,93 |
| 4. | Banjarsari | 112,93 | 130,43 | 243,37 |
| 5. | Majapura | 75,31 | 61,19 | 136,51 |
| 6. | Bobotsari | 55,93 | 89,38 | 145,32 |
| 7. | Karangduren | 49,93 | 72,58 | 122,52 |
| 8. | Pakuncen | 129,60 | 30,41 | 160,02 |
| 9. | Karangtalun | 124,44 | 47,07 | 171,52 |
| 10 | Gunungkarang | 57,93 | 73,95 | 131,89 |
| 11. | Talagening | 35,69 | 160,06 | 195,76 |
| 12. | Tlagayasa | 66,93 | 168,41 | 235,35 |
| 13. | Dagan | 107,18 | 177,63 | 284,82 |
| 14. | Limbasari | 68,50 | 339,47 | 407,98 |
| 15. | Palumbungan | 73,93 | 232,07 | 306,01 |
| 16. | Palumbungan Wetan | 41,83 | 207,35 | 249,19 |
|  | Jumlah | 1.286,00 | 1.942,00 | 3.228,00 |

Sumber : Data BPS tahun 2016

**Tabel 5.**

**Luas Wilayah Menurut Desa dan Penggunaannya (ha)**

* + 1. **Demografi**
  1. Jumlah penduduk Kecamatan Bobotsari (keadaan per 31 Desember 2016) yaitu 55.612 jiwa, terdiri dari :

- Laki-laki : 28.053 jiwa

- Perempuan : 27.559 jiwa

b. Laju pertumbuhan penduduk 1,07% dengan kepadatan penduduk 1.533 jiwa/km2, dengan jumlah 11.878 rumah tangga.

c. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Bobotsari per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

* Pertanian : 5.415 orang
* Perdagangan : 3.212 orang
* PNS/TNI/Polri/Pensiunan : 1.901 orang
* Buruh : 14.784 orang
* Pengusaha : 250 orang
* Jasa Angkutan : 1.262 orang

1. Tingkat Pendidikan

- Tamat SD dan MI : 1.151 orang

- Tamat SLTP : 1.628 orang

- Tamat SLTA : 1.070 orang

- Tamat Diploma : 743 orang

- Tamat Perguruan Tinggi : 573 orang

* + 1. **Infrastruktur**
  1. Pendidikan

- TK/RA/BA : 22

- SD/MI : 28

- SLTP : 7

- SLTA : 5

b. Prasarana Kesehatan

- Rumah Sakit : 1

- Puskesmas : 1

- Pustu : 1

c. Korespondensi dan Komunikasi

- Warnet : 6

- Titipan Kilat selain PT. Pos : 4

- Kantor Pos : 1

- Menara Telepon Seluler : 9

d. Perekonomian

- Koperasi : 5

- Pasar Umum : 1

- Mini Market : 7

e. Prasarana Jalan

Seluruh desa di wilayah Kecamatan Bobotsari dapat dilalui jalur darat dan sudah beraspal, dapat dilalui kendaraan roda 4.

f. Sarana dan Prasarana Listrik

Listrik sudah menjangkau seluruh desa.

* + 1. **Pemerintahan**

1. Kecamatan Bobotsari terdiri dari 16 Desa, 54 Dusun, 108 Rukun Warga, dan 344 Rukun Tetangga.
2. Instansi Pemerintah yang ada di Kecamatan Bobotsari antara lain :

- Instansi Otonom : Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyuluh Pertanian, UPT Dinas Sosial, PP, KB, dan P3A.

- Instansi Vertikal : KUA, Badan Pusat Statistik, Kantor Pos dan Giro, Perhutani, Polsek, Koramil

- Instansi BUMN/BUMD : Bank Jateng, BRI, BKK

* 1. **Kinerja Pelayanan OPD**

OPD Kecamatan Bobotsari pada tahun 2016 melaksanakan 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi kegiatan :
2. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran;
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD.
7. Program Pengembangan Wilayah, berupa kegiatan Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan;
8. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan, meliputi kegiatan :
   1. Rehabilitasi Rumah Dinas eks Wedana Bobotsari;
   2. Penyelesaian Paving Kecamatan Bobotsari;
   3. Penyelesaian Pembangunan Halaman Kantor Kecamatan Bobotsari (luncuran).
9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, berupa kegiatan Pendampingan KPMD (Bangub).

Selain melaksanakan program-program tersebut, OPD Kecamatan Bobotsari juga melaksanakan program pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang masih relevan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Melaksanakan Program Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Kecamatan dan Desa.
2. Melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
   1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Pengidentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal maupun eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Kecamatan Bobotsari sebagai OPD yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya.

Adapun yang menjadi tantangan OPD Kecamatan Bobotsari dilihat dari faktor internal organisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

a. kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;

1. kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat;
2. kurangnya jumlah ASN Kecamatan.

Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya ancaman yang telah diidentifikasi sebagai berikut :

1. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah;
2. kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
3. kurangnya kepercayaan masyarakat pada ASN;
4. adanya mutasi pegawai kecamatan;
5. terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Di samping tantangan-tantangan tersebut, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok OPD Kecamatan Bobotsari yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. adanya dukungan pemimpin;
2. adanya sarana dan prasarana yang memadai;
3. adanya program yang jelas;
4. tersedianya *job description* yang jelas;

Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

* 1. adanya kesempatan mengikuti diklat bagi ASN Kecamatan;
  2. adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan;
  3. adanya kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
  4. adanya dukungan dari aparat pemerintah desa.

Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut di atas, maka guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi, beberapa hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. memanfaatkan dukungan pimpinan untuk memanfaatkan kesempatan diklat bagi ASN;
2. memanfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang valid;
3. memanfaatkan program dan kewenangan yang jelas untuk optimalisasi bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. memanfaatkan *job description* yang jelas dan dukungan aparat untuk optimalisasi pembangunan;
5. memanfaatkan sarana prasarana yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat guna optimalisasi pembangunan;
6. meningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
7. mengembangkan manajemen dan mekanisme pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

1. mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN;
3. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.

Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi serta dengan mengindentifikasi kekuatan dan peluang, maka diperlukan kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Bobotsari untuk 1 (satu) tahun yang akan datang guna mendukung pencapaian terlaksananya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga*.*

**BAB III**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2016**

**3.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan Bobotsari Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bobotsari merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Kinerja Kantor Kecamatan Bobotsari tahun 2016 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2016 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini antara lain dikarenakan adanya penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD, dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari sampai dengan akhir tahun 2016, sebagai berikut :

* + 1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)

Alokasi Anggaran Tahun 2016 untuk Kegiatan Belanja Pegawai sesuai DPA sebesar Rp 1.244.913.000,00 yang kemudian berkurang pada DPPA menjadi Rp 1.239.018.000,00. Sepanjang tahun 2016, Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 1.210.044.124,00 atau 97,66%, dengan sisa belanja sebesar Rp 28.973.876,00.

* + 1. Belanja Langsung
  1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Terdiri dari 5 (lima) Kegiatan yaitu :

* 1. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dikarenakan tersedianya bahan dan jasa perkantoran untuk 14 orang ASN Kecamatan Bobotsari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 92.127.000,00 terealisasi Rp 87.598.572,00 atau 95,08%.

* 1. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan jajaran instansi terkait, di dalam dan luar wilayah Kabupaten Purbalingga, dengan alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp 60.090.000,00 terealisasi Rp 54.852.745,00 atau 91,28%.

* 1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik untuk meningkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 95.073.000,00 terealisasi Rp 93.543.250,00 atau 98,39%.

* 1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai guna mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 316.475.000,00 terealisasi Rp 314.797.750,00 atau 99,47%.

* 1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD sebagai pedoman terlaksananya Program Kegiatan dan tercapainya target capaian kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 terealiasi Rp 3.020.000,00 atau 60,40%.

* 1. Program Pengembangan Wilayah

Terdiri atas 1 (satu) Kegiatan, yaitu Kegiatan Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan. Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan monitoring dan koordinasi di wilayah Kecamatan Bobotsari (16 desa) untuk meningkatkan fungsi kecamatan sebagai fasilitator kegiatan di wilayah, dengan alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp 92.840.000,00 terealisasi Rp 70.981.700,00 atau 76,46%.

* 1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan

1. Rehabilitasi Rumah Dinas eks Wedana Bobotsari

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas eks Wedana Bobotsari, untuk terpenuhinya keindahan lingkungan Kantor Kecamatan Bobotsari, dengan besar alokasi anggaran Rp 200.000.000,00 terealisasi Rp 194.825.000,00 atau 97,41%.

1. Penyelesaian Paving Kecamatan Bobotsari

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan Penyelesaian Paving Kecamatan Bobotsari, untuk terpenuhinya keindahan lingkungan Kantor Kecamatan Bobotsari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 terealisasi Rp 146.568.000,00 atau 97,12%.

1. Penyelesaian Pembangunan Halaman Kantor Kecamatan Bobotsari (luncuran)

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan Penyelesaian Pembangunan Halaman Kantor Kecamatan Bobotsari yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015, untuk terpenuhinya keindahan lingkungan Kantor Kecamatan Bobotsari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.990.000,00 terealisasi Rp 9.990.000,00 atau 100%.

* 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat

Terdiri atas 1 (satu) Kegiatan, yaitu Kegiatan Pendampingan KPMD (Bangub). Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan Pendampingan KPMD (Bangub) untuk terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.000.000,00 terealisasi Rp 16.000.000,00 atau 100%.

Program dan kegiatan di atas sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubajan Anggaran (DPPA) Kecamatan Bobotsari Tahun 2016. Berdasarkan Evaluasi Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Bobotsari. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru.

**3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari**

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bobotsari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

* 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
  2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
  3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
  5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa.
  6. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.
  7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah.
  8. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
  9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Kecamatan Bobotsari memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan
   * 1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas di desa;
     2. Peningkatan Siskamling di tingkat desa, dusun sampai tingkat RW, dan RT;
     3. Mengadakan monitoring rutin gabungan Muspika dan dinas terkait serta desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat;
     4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika, dinas, dan instansi terkait;
     5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain Operasi Miras, Narkoba, dan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
     6. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat Peraturan Desa sebagai dasar atau payung hukum tingkat desa;
     7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Muspika, Satpol PP, Linmas, dan Puskesmas;
     8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
     9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di desa;
     10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di kecamatan;
     11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan maupun desa;
     12. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
     13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari, melibatkan personil kecamatan, dinas, dan desa;
     14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas dan instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan aparat yang ada di dinas dan instansi pada tingkat kecamatan;
     15. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
     16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dll.
     17. Mengikutsertakan pihak desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa;
     18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
   * + 1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub, dan sumber dana lainnya);
       2. Memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan;
       3. Memfasilitasi, membina, dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, talud, sekolah, dan pelatihan yang dilaksanakan di desa;
       4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
       5. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
       6. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
       7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayah Kecamatan Bobotsari.
       8. Memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan Pengadaan Air Minum Masyakat (Pamsimas);
       9. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
       10. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
       11. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
       12. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.
3. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan
   * + - 1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin);
         2. Monitoring penyaluran bantuan PKH, korban bencana dan dana sosial lainnya;
         3. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan;
         4. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
         5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
         6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
         7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan, dan kemasyarakatan;
         8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
   1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Kecamatan Bobotsari sesuai tugas pokok dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (dinas, badan, lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Bobotsari masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain prasarana dan sarana yang tersedia kurang memadai dan kurang layak pakai, sistem pembagian tugas yang belum optimal, sumber daya pegawai yang kurang memadai, dan kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bobotsari, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Bobotsari, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Corporate Social Resposipility* (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu, perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi desa seluas-luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Bobotsari harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
   1. **Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

* 1. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  2. program prioritas pembangunan daerah;
  3. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bobotsari. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah, dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Bobotsari dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Bobotsari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Bobotsari sesuai dengan sistem pusat kegiatannya termasuk kategori Sistem Perkotaan, yaitu sebagai wilayah Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yang artinya akan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai PKL baru dengan skala pelayanan untuk beberapa wilayah kecamatan.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga juga seharusnya banyak mengarah ke Kecamatan Bobotsari baik dari sisi ekonomi, industri, jasa, maupun pariwisata.

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Tahun 2017 Kecamatan Bobotsari juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut.

Pertama, kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkapitulasi dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria : (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasarkan bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari pada tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan, serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD, dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kecamatan.

**BAB IV**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. **Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021, yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***.

Mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, memasuki pelaksanaan Tahap Ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Tahap Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dengan memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif, dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 diarahkan untuk ***“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”***.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Inspektorat;

Dinas;

Badan dan Kecamatan.

1. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
2. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
3. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
4. Pasal 224 ayat (1) menyebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Pasal 225 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :
6. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
7. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
10. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
12. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 226 ayat (1) menyebutkan bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Bobotsari dalam pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
   1. **Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari**

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Bobotsari, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Bobotsari.

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Renstra, maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari masing-masing Misi Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
2. Meningkatkan kemandirian pembangunan pada masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan toleransi kehidupan beragama baik intra maupun antar umat beragama.
5. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing.
7. Meningkatkan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Meningkatkan peranan wanita.
   1. **Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bobotsari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bobotsari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja, dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan, dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari.

Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2017, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya;
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya.
6. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bobotsari Tahun Anggaran 2017, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 mengacu pada DPA Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
3. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi kegiatan :

* Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
* Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
* Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
* Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
* Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

1. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, meliputi kegiatan :

* Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan
* Pendampingan KPMD (Bangub)

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bobotsari Tahun 2017 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala prioritas pembangunan Tingkat Provinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah maupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program/kegiatan, yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsari pada tahun 2017.

Kecamatan Bobotsari sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bobotsari Tahun 2017 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

1. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
2. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi Anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2017.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bobotsari.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2017, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2017 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia. Amin.

Bobotsari, 23 Januari 2017

Camat Bobotsari

**Drs. H. HARSONO**

Pembina Tingkat I

NIP. 19661117 199403 1 006